

POLITIK EKONOMI DAN KEMISKINAN (STUDI KOMPARATIF POLITIK EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS, DAN ISLAM)

Oleh :

Hidayat

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

Email : hidayat@eco.uir.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Kemiskinan merupakan persoalan klasik mengalami peningkatan dari hari ke hari. Meski melalui pemberitaan yang disampaikan mengalami penurunan secara rata-rata (agregat), namun secara faktual kemiskinan selalu mengalami peningkatan. Diperlukan solusi fundamental dalam mengatasi persoalan kemiskinan, karena kondisi yang kemiskinan yang ada melatarbelakangi lahirnya persoalan sosial lainnya, seperti kriminalitas, kekerasan, bahkan sampai melakukan kekufuran (murtad). Penerapan Sistem Politik Kapitalis-Liberal dan Sosialisme-Komunis terbukti gagal dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Bahkan dari penerapan sistem tersebut, melahirkan kemiskinan struktural di tengah masyarakat. Realitas yang berbeda dari penerapan sistem Politik Ekonomi Islam, di mana Negara menjamin terpenuhi kebutuhan pokok setiap orang secara keseluruhan, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupan sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, dengan penerapannya akan meminimalisir angka kemiskinan, dan juga memungkinkan tingkat kemiskinan menjadi *zero percent*. Secara historis telah terbukti pada masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz *radhiallahu 'anhu*, petugas Negara mengalami kesulitan mencari fakir/miskin dalam pendistribusian harta zakat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Politik Ekonomi

ABSTRACT

Poverty is a condition when the inability to fulfill basic needs such as clothing, food, shelter, education, health, security. Poverty is a classic problem that is increasing day by day. Even though the news conveyed has decreased in average (aggregate), in fact poverty has always increased. A fundamental solution is needed in overcoming the problem of poverty, because the existing poverty condition is the background for the birth of other social problems, such as crime, violence, and even committing kufr (apostasy). The application of the Capitalist-Liberal Political System and Socialism-Communist has proved to be a failure in solving the problem of poverty. Even from the application of this system, it creates structural poverty in the community. A different reality from the application of the Islamic Political Economy system, in which the

State guarantees the fulfillment of the basic needs of each person as a whole, as well as the possibility of himself fulfilling his secondary and tertiary needs, according to the level of ability as an individual who lives in a society that has a lifestyle (life style). Guarantee the fulfillment of primary needs (clothing, food, shelter, education, health, and security) is carried out through various mechanisms, either directly or indirectly. So, by implementing it will minimize the poverty rate, and also allow the poverty rate to be zero percent. It has been historically proven that at the time of the Caliph Umar Ibn Abdul Aziz radhiallahu 'anhu, state officials had difficulty finding the poor / poor in distributing zakah assets.

Keywords: Poverty, Political Economy

PENDAHULUAN

Secara sunnatullah, kemiskinan telah muncul dan ditemukan dalam kehidupan manusia. Realitas demikian juga sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya bahwa Allah SWT meninggikan rizki sebagian manusia atas sebagian yang lain (QS. 29: 62, 16: 71). Secara fitrah, banyak orang yang tidak mahu hidup miskin, dan memilih hidup berkecukupan bahkan kaya. Islam pun tidak melarang seseorang memiliki berkecukupan materi dan harta benda. Bahkan di antara para sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan legalitas jaminan syurga ketika mereka masih hidup dan mereka para pengusaha dan memiliki harta benda, di antaranya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman Ibn Affan, Abdurrahman Ibn Auf, dan lainnya.

Meski demikian, harta dan kekayaan bukanlah tujuan utama yang dikejar oleh mereka, tetapi harta dan kekayaan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga terlihat dari sikap mereka yang dermawan, tidak ragu dalam menginfakkan harta dan kekayaan mereka untuk urusan agama dan akhirat. Dan begitulah sejatinya seorang muslim, tidak menjadikan harta dan kekayaan/materi sebagian tujuan, tetapi harta dan

kekayaan/materi sebagai sarana meraih ridha Allah SWT, yakni tujuan tertinggi dari setiap perbuatan yang dilakukan di dunia.

Namun, di kalangan sahabat banyak di antara mereka yang hidup dalam keadaan miskin dan bahkan tidak sedikit memilih hidup miskin, misalkan Ali Ibn Abi Thallib. Terlepas dari itu semua, dalam perspektif Islam kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan. Kemiskinan bukanlah persoalan individu semata dan individu itu sendiri yang dituntut untuk menyelesaikan persoalannya. Tetapi, Islam menjadikan persoalan kemiskinan merupakan persoalan sosial dan Negara dituntut untuk mencari solusi tuntas dalam mengatasinya. Karena, kemiskinan yang dialami seseorang/individu, akan berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara, seperti kriminalitas, kekerasan, dan bahkan tidak sedikit menghantarkan seseorang atau komunitas masyarakat kepada kekufuran.

Syekh Yusuf al-Qardhawi (2002: 65) menjelaskan bahwa sikap Islam atas problem kemiskinan. “Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai sebuah problem kehidupan yang perlu dicarikan solusi dan jalan keluar. Bahkan, kemiskinan merupakan “penyakit” yang perlu mendapat perhatian serius dan penanggulangan yang

segera. Islam menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan. Tapi bukan berarti dengan berusaha mengentaskan kemiskinan tersebut, kita menentang kehendak Allah SWT.”

Selain itu, Syekh Yusuf al-Qardhawi (2002: 288-289) juga menjelaskan di dalam bukunya bahwa sarana pengentasan kemiskinan. “Sarana yang pertama adalah hanya khusus untuk fakir miskin. Ia harus ditunaikan ketika seseorang mampu dan memiliki harta kekayaan. Sarana yang kedua, terkait dengan masyarakat Islam secara kolektif, yang harus sama-sama peduli terhadap persoalan yang dihadapi fakir miskin. Sarana ketiga, terkait dengan negara Islam yang secara normatif- doktriner wajib memberikan jaminan terhadap semua anggota masyarakat yang memerlukan bantuan, sementara ia tidak mendapatkan perhatian dari anggota masyarakat sendiri”.

Berdasarkan uraian di atas, memang pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab banyak pihak, tetapi Islam menjadikan Negara sebagai pihak yang sangat bertanggung jawab dan menjamin terpenuhi kebutuhan pokok (*basic needs/hajatul asasiyah*) setiap individu tanpa terkecuali, agar setiap individu dalam suatu Negara merasakan hidup yang layak dan keluar dari masalah kemiskinan.

Kewajiban yang ditetapkan Islam kepada Negara dalam menjamin terpenuhi kebutuhan pokok setiap individu, karena Negara memiliki seperangkat komponen dan kekuatan serta kewenangan yang dapat digunakan dalam mengeluarkan individu dari masalah kemiskinan. Seperangkat komponen, kekuatan dan kewenangan yang dimiliki diimplementasikan melalui penerapan Politik Ekonomi.

Secara ideologi, dunia mengenal tiga bentuk, yakni Kapitalisme, Sosialis-Komunis, dan Islam. Dari ketiga ideologi tersebut melahirkan sistem politik ekonomi, yakni Sistem Politik Ekonomi Kapitalis, Politik Ekonomi Sosialis, dan Sistem Politik Ekonomi Islam. Realitasnya, Politik Ekonomi Sosialis-Komunis telah berakhir secara institusi dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai Negara yang pernah menjadi adidaya dunia. Dengan demikian, sistem politik ini telah gagal mewujudkan kesejahteraan dan mengeluarkan manusia dari persoalan kemiskinan.

Adapun sistem Politik Ekonomi Kapitalisme juga gagal dalam mewujudkan kesejahteraan dan mengeluarkan manusia dari kemiskinan. Bahkan penerapan sistem Politik Ekonomi Kapitalis telah banyak mewarisi kemiskinan. Berbeda dengan Islam, meski saat ini sulit menggambarkannya, namun secara historis ketika Islam berkuasa, dan menerapkan sistem Politik ekonominya, mampu mewujudkan kesejahteraan setiap individu tanpa terkecuali. Sejarah mencatat di masa kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Abdul Azis, berhasil menghantar dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran secara merata. Sehingga pada masa kepemimpinan, kesulitan petugas Negara mencari fakir-miskin yang berhak menerima zakat. Artinya, masyarakat hidup dalam kondisi sejahtera dan makmur, minimal kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara merata.

RUMUSAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan pada bagian pendahuluan di atas, ditetapkan rumusan masalah adalah: 1). Bagaimanakah Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam

Sistem Politik Ekonomi Kapitalis dan Sosialis?, 2). Bagaimanakah Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Politik Ekonomi Islam dan Sistem Politik Ekonomi Ideal? Adapun tujuan masalah, adalah: 1). Untuk mengetahui Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Politik Ekonomi Kapitalis dan Sosialis?, 2). Untuk mengetahui Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Politik Ekonomi Islam dan Sistem Politik Ekonomi Ideal.

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Politik Ekonomi Islam

Politik dan Ekonomi merupakan dua cabang ilmu sosial memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Akan tetapi, ketika keduanya memiliki keterikatan dan hubungan yang erat satu sama lain. Secara sederhana, politik berkaitan dengan kekuasaan. Sementara ekonomi berkaitan dengan dana yang dihasilkan dari sumber daya yang tersedia di suatu daerah.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang berarti kota yang berstatus negara (*city state*). Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan *zoon politikon* yang kemudian terus berkembang menjadi *polites* (warga negara), *politeia* (hal-hal yang berhubungan dengan negara), *politika* (pemerintahan negara), lalu terakhir menjadi *politikos* (kewarganegaraan). Miriam Budiardjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. (Lihat: <https://salamadian.com/pengertian-politik-adalah/31//12/2018>)

Dalam Islam, Politik adalah perkara cabang yang berubah (*متغير*) dan dinamis (*متطور*). Imam Syafi’i, misalnya, meletakkan politik sebagai cabang, bukan cabang akidah pula, tetapi sekadar cabang syariah:

السياسة جزء من اجزاء الشريعة وفرع من فروعها

Artinya: “Politik adalah bagian dari syariah dan salah satu cabang di antara cabang-cabangnya.”

Menurut Prof Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran fikih (2002), *siyasa* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

Politik di dalam Islam merupakan perkara penting dan nilai-nilai Islam yang perlu diadaptasi sebagai inspirasi politik. Namun politik (*siyasa*) merupakan sarana (*وسيلة*), karena tujuan atau *ghayah* sebenarnya adalah kehidupan adil, makmur, dan sejahtera (*بلدة طيبة ورب غفور*) (Lihat: <https://geotimes.co.id/kolom/politik/membedah-islam-politik-politik-islam-dan-khilafah/1/12/2017>)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut.

Kata “ekonomi” diambil dari bahasa Yunani kuno (*Greek*), maknanya adalah mengatur urusan rumah tangga. Di

dalamnya anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga, dan membantu memberikan jasa. Lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Kemudian populasi orang-orangnya semakin banyak dalam rumah-rumah, dan selanjutnya menjadi suatu komunitas yang diperintah oleh Negara (An-Nabhni, 2018: 62).

Karena itu, yang dimaksud dengan ekonomi disini bukanlah makna bahasanya, yakni hemat (*save*), juga bukan berarti kekayaan. Akan tetapi yang dimaksud ekonomi disini adalah kegiatan mengatur urusan kekayaan, serta menjamin pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun berhubungan dengan tatacara (mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.

Menurut An-Nabhani (Zulhelmy, 2013: 140), sistem ekonomi menjelaskan tentang distribusi harta/kekayaan, pemilikan, serta menjelaskan berbagai transaksi terhadap harta kekayaan tersebut. Sementara ilmu ekonomi menyinggung tentang produktivitas, kualitas maupun kuantitas produksi, membahas apa yang harus dihasilkan dan bagaimana cara menghasilkan, atau dengan teknik, teknologi apa yang harus digunakan, agar setiap input digabungkan dan diolah supaya menghasilkan output yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Politik Ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat. Hanya saja, terkait dengan cara-cara yang ditempuh atau

tindakan yang diambil oleh pemerintah, ditentukan oleh ideologi yang diadopsi oleh suatu negara. Ketika yang diadopsi Islam, maka cara-cara yang ditempuh sesuai Islam, dan dikenal dengan Politik Ekonomi Islam, dan begitu sebaliknya., Ketika cara-cara yang ditempuh dipengaruhi/lahir dari ideologi selain Islam (Kapitalisme atau Sosialisme), maka Politik Ekonomi-nya dikenal dengan Politik Ekonomi Kapitalisme, atau Politik Ekonomi Sosialisme.

Abdurrahman Al-Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi Islam (*As-Siyasah Iqtishadiyah al-Mutsala*) secara gamblang dijelaskan tentang konsep Politik Ekonomi Islam dan kritikan terhadap praktek Politik Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme. Di samping itu, kebobrokan penerapan Politik Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme di negeri-negeri Islam termasuk Indonesia telah nyata dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan

Sejarah mencatat bahwa perekonomian Indonesia mengalami perkembangan pesat pada awal tahun 1997, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Bahkan perekonomian Indonesia dijuluki sebagai macan asia. Namun, sejarah pun mencatat pada bulan September 1997. Indonesia mengalami krisis moneter yang luar biasa. Nilai rupiah terhadap dollar sempat mencapai Rp. 16.000. Hingga kini pun, Indonesia belum pulih dari krisis moneter yang berkepanjangan. Ditambah lagi pasca pandemi Covid-19, tidak hanya Indonesia, bahkan dunia termasuk negara adidaya juga mengalami gejolak ekonomi.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Di mana persoalan kemiskinan tidak berdiri sendiri

dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Secara bahasa, “miskin” berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan “kefakiran yang sangat.” Allah SWT menggunakan istilah tersebut di dalam firman-Nya:

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya: “atau kepada orang miskin yang sangat fakir.” (TQS. Al-Balad [90]: 16).

Sedangkan kata “fakir” berasal dari kata “*al-Faqru*” berarti membutuhkan (*al-Ihtiyaj*). Sedangkan orang yang membutuhkan disebut fakir. Allah SWT berfirman:

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا

أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian Dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: “Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.” (TQS. Al-Qashash [28]: 24)

Imam Syafii dan Jumhur Ulama (Zulhelmy, 2013: 151) mendefinisikan miskin adalah memiliki sesuatu (penghasilan/pendapatan), tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok (*hajatu al-Asasiah*). Defenisi yang lebih definitif, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (2018) mendefinisikan kemiskinan adalah orang yang tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai sumber pendapatan. Sementara fakir, adalah orang yang memiliki harta, namun kebutuhan mereka lebih banyak ketimbang harta yang mereka miliki.

Di samping itu, *World Bank* (2000), juga memperkenalkan pengertian kemiskinan, yaitu kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well Being*). Sedang inti permasalahan pada kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri.

Menurut Friedman (1982), kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada: (1) modal produktif atau aset (misalnya organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) net work atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lainlain; (3) pengetahuan dan ketrampilan yang memadai; dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Menurut Zulhelmy (2013), kemiskinan dan pemiskinan berasal dari akar kata yang sama, yaitu miskin. Hanya saja prefix “ke-an” dan “pe-an” memiliki arti yang sama sekali jauh berbeda. Kemiskinan diartikan sesuatu yang memang sudah dari sananya bahwa miskin tersebut melekat pada diri manusia. Adapun pemiskinan dapat diartikan suatu proses yang berlangsung secara sistematis dan terus menerus, sehingga seseorang menjadi miskin dan itu terjadi bukan kehendaknya.

Sedang kemiskinan menurut para ahli ekonomi mendefinisikan kemiskinan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ukuran “cukup”, misalnya pemenuhan kalori minimal per hari, atau jumlah konsumen pangan minimal harian. Kepala BPS (Badan Pusat Statistik), Suhariyanto menyebut seseorang dikategorikan sebagai miskin atau

tidak diukur dari garis kemiskinan. Per Maret 2019, garis kemiskinan Rp. 425.250 per bulan. Angka tersebut naik 5,99 persen dibanding Maret 2018 Rp. 401.220 per bulan. (Lihat: <https://www.inews.id/finance/keuangan/standar-kemiskinan-pengeluaran-sebulan-rp199-juta-per-keluarga>).

Syekh Yusuf al-Qardhawi (2002: 65) menjelaskan bahwa sikap Islam atas problem kemiskinan. “Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai sebuah problem kehidupan yang perlu dicarikan solusi dan jalan keluar. Bahkan, kemiskinan merupakan “penyakit” yang perlu mendapat perhatian serius dan penanggulangan yang segera. Islam menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan. Tapi bukan berarti dengan berusaha mengentaskan kemiskinan tersebut, kita menentang kehendak Allah SWT.”

Selain itu, Syekh Yusuf al-Qardhawi (2002: 288-289) juga menjelaskan di dalam bukunya bahwa sarana pengentasan kemiskinan. “Sarana yang pertama adalah hanya khusus untuk fakir miskin. Ia harus ditunaikan ketika seseorang mampu dan memiliki harta kekayaan. Sarana yang kedua, terkait dengan masyarakat Islam secara kolektif, yang harus sama-sama peduli terhadap persoalan yang dihadapi fakir miskin. Sarana ketiga, terkait dengan negara Islam yang secara normatif- doktriner wajib memberikan jaminan terhadap semua anggota masyarakat yang memerlukan bantuan, sementara ia tidak mendapatkan perhatian dari anggota masyarakat sendiri”.

Di samping itu, dari berbagai literatur ditemukan beberapa pembagian kemiskinan menurut para ahli/ulama, sebagai berikut:

1. Miskin Faktual dan Hakekat

“Sesungguhnya orang yang miskin adalah orang yang tak pernah merasa cukup”. Banyak orang yang berpotensi atau berpeluang memperkaya diri, tapi tidak mau melakukannya. Rasulullah dan para khalifah terdahulu adalah teladan umatnya. Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin dunia malah berdoa pada Allah agar “dimiskinkan”. Kebanyakan penduduk surga kata Rasulullah SAW adalah berasal dari kalangan miskin. Meski Beliau SAW mampu menjadikan dirinya kaya, namun Beliau SAW merasa cukup dan lebih memilih hidup miskin dari pada kaya dan bergelimang harta benda. Dengan demikian, secara faktual beliau miskin, tapi hakikatnya kaya.

Sebaliknya, para konglomerat pada hakikatnya miskin. Sebab, nafsu serakahnya selalu merasa kekurangan. Tak merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga sering dijumpai melakukan tindakan yang dilarang, baik berdasarkan agama dan juga berdasarkan konstitusi yang ada dan berlaku

2. Miskin Alamiah dan Struktural

AM Saefuddin dalam Zuhelmy (2012: 154) membagi kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena misalnya cacat mental atau fisik, lahir dari dan dalam keluarga miskin, dan faktor lain yang tak terduga, seperti bencana alam, kebangkrutan dan lain sebagainya. Sedangkan kemiskinan struktural, adalah kemiskinan kemiskinan yang diciptakan oleh sistem, nilai, perilaku bejat manusia. Sistem kapitalis dan sosialis dengan asas manfaat bebas nilai, membidani kelahiran para elit politik dan konglomerat yang

menghalalkan segala cara, bergelimang kemewahan di atas penderitaan mayoritas umat manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2002) Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Politik Ekonomi Kapitalis dan Sosialis

Secara prinsip, Negara manapun di dunia menilai bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang harus diatasi dan dicari solusinya, termasuk Negara adidaya sebagai pengemban dan percontohan dari penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis seperti Amerika Serikat. Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan memang menjadi momok yang harus diselesaikan negara (Lihat: suara.com/bisnis/2018/08/02).

Namun secara konsep, sistem kapitalisme merupakan sistem di mana peran pemerintah sangatlah lemah, kurang, atau bahkan tidak ada sama sekali dalam

mengatur perekonomian masyarakat. Artinya, perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar, dan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam perekonomian. Sehingga secara institusi Kenegaraan, Politik Ekonomi Kapitalis yang diadopsi oleh suatu Negara bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebaskan-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya hak hidup setiap orang (An-Nabhani, 2018: 69).

Dengan demikian, di Negara yang menerapkan sistem Politik Ekonomi Kapitalis, individu yang memiliki modal akan mampu bersaing dan mampu bertahan hidup serta mampu mewujudkan kemakmuran, sementara individu yang tidak memiliki modal, akan tetap pada keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena tidak mampu bersaing dan mewujudkan kemakmuran. Sehingga konsep ini membidani lahirnya jurang pemisah yang sangat luas antara yang kaya dan miskin. Sehingga, kemiskinan-pun merupakan kondisi yang tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat.

Kebebasan yang diberikan kepada individu sebebaskan-bebasnya merupakan derivat dari tiga pilar ekonomi yang menopang berdirinya sistem ekonomi kapitalis, yaitu 1) problem kelangkaan (*scarcity*) relatif barang dan jasa, 2) Nilai (*value*) suatu barang yang diproduksi, dan 3) Harga (*price*) serta fungsi yang dimainkan dalam produksi, konsumsi dan distribusi (An-Nabhani, 2018: 16).

Ketiga pilar tersebut lahir dari prinsip *sekularisme*, yakni pemisahan agama dari kehidupan. Oleh karena agama tidak

ada peluang dalam mengatur kehidupan, dan Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan perekonomian, individu dalam Negara Kapitalis diberikan kebebasan dalam mengumpulkan kekayaan sebebas-bebasnya. Kebebasan tersebut juga terlihat dari konsep kepemilikan hanya dikenal dan diakui dalam sistem Kapitalis, yaitu kepemilikan individu (*private property*). Meski kemiskinan dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan, namun dengan penerapan Politik Ekonomi Kapitalis, menyebabkan munculnya kemiskinan.

Realitas kemiskinan di Negara yang menerapkan Sistem Politik Ekonomi Kapitalis dapat diketahui dari peristiwa protes Occupy Wall Street (OWS), hari Sabtu 17 September 2011, dimana lebih dari 1.000 orang berjalan ke arah Distrik Finansial di Lower Manhattan, New York City melakukan gerakan protes. Menggelar gerakan protes dengan slogan "We are the 99%". Dalam aksi tersebut, para aktivis memprotes ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, angka pengangguran yang tinggi, keserakahan, serta korupsi, dan pengaruh perusahaan, terutama dari sektor jasa keuangan terhadap pemerintah. Kritik dilancarkan tepat di jantung kapitalisme Amerika Serikat, sekaligus hulu aturan perekonomian dunia (Lihat: <https://www.liputan6.com/global/read/2106060>).

Slogan "We are the 99%" diteriakkan lantang oleh kaum '99 persen', menentang kesenjangan pendapatan di AS, di mana orang-orang kaya yang monoritas, jumlahnya hanya 1 persen, menguasai perekonomian dan kebijakan AS yang juga mempengaruhi bagaimana Negeri AS melihat budaya dan kemanusiaan (Lihat: <https://www.liputan6.com/global/read/2106060>).

Beberapa tahun kemudian, Gedung Putih hari Kamis (12/7/2018) mengeluarkan laporan menyatakan bahwa perang melawan kemiskinan di Amerika yang dimulai lebih dari 50 tahun lalu untuk memperbaiki jaringan pengaman sosial bagi warga termiskin di negara dengan ekonomi terbesar di dunia sebagian besar sudah selesai dan sukses. Laporan tersebut bertentangan dengan laporan lain tentang kemiskinan yang disampaikan oleh PBB pada bulan sebelumnya. Laporan yang disampaikan oleh Dewan Penasehat Ekonomi Presiden Trump, menyatakan bahwa kemiskinan apabila diukur dari konsumsi sudah turun 90% sejak tahun 1961. Juga dikatakan dewasa ini hanya terdapat 3% penduduk Amerika yang hidup di bawah garis kemiskinan, bertentangan dengan laporan kemiskinan yang disampaikan PBB yang menyatakan kurang lebih 12% penduduk Amerika hidup dalam kemiskinan (Lihat: <https://www.voaindonesia.com/14/7/2018>).

Realitas kesenjangan akan lebih terlihat dan dialami oleh Negara-negara dunia ketiga. Menurut Zulhelmy (2013: 154-155), Negara dunia ketiga yang menganut sistem Kapitalisme, menciptakan kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial yang lebar. Dicontohkan kasus Liem Sio Liong, pernah menjadi pengusaha terkaya di antara 50 konglomerat se-Asean. Bandingkan dengan upah harian almarhum Marsinah yang hanya Rp. 1.750 perhari. Tentu hanya dalam sehari Liem Sio Liong, mampu meraup uang sejumlah puluhan ribu kali lipat gaji Marsinah. Dengan demikian, jelaslah bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Politik Ekonomi Kapitalis. Bahkan sistem ini, yang banyak mewarisi kemiskinan, yakni kemiskinan struktural.

Di samping Kapitalis, sistem Ekonomi Sosialis-Komunis dengan penerapan Politik Ekonomi Sosialis telah berakhir gagal dalam mewujudkan kesejahteraan. Meski dalam sistem Sosialis-Komunis angka kemiskinan lebih kecil dari pada Negara yang mengadopsi sistem Kapitalis, namun sistem juga tidak berhasil mengeluarkan masyarakat dari persoalan kemiskinan.

Kesenjangan sosial (kaya-miskin) di Negara Sosialis-Komunis (Soviet dan Eropa Timur) masih tetap terjadi. Menurut Lenski (1996) dalam Zulhelmy (2013: 154), pada tahun 50-an perbedaan ekstrim gaji maksimum-minimum di Rusia, sekitar 15-20 kali. Sementara ketika itu di Amerika Serikat, mencapai 20-200 kali. Pada tahun 80-an di *Top Income* Rusia sebesar Rp. 80.000 rubel, atau sekitar 300 kali lipat gaji minimum. Sementara di Amerika Serikat mencapai 11.000 kali lipat.

Adapun gagalnya sistem Sosialis-Komunis dalam mengatasi persoalan kemiskinan, karena Politik Ekonomi Sosialis-Komunis bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya setiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut (An-Nabhani, 2018: 69). Dalam sistem ini, menitikberatkan penyelesaian secara kolektif. Karena sistem ekonomi Sosialis-Komunis, dibangun di atas tiga pilar, yaitu 1) Mewujudkan kesamaan (*equality*) secara riil, 2) Menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian, dan 3) Mengatur produksi dan distribusi secara kolektif (An-Nabhani, 2018: 44).

Secara umum ketiga pilar dalam sistem Sosialis-Komunis berlandaskan pada teori Dialektika Materialisme dan Materialisme Historis sehingga tidak bersandar pada kepercayaan mitos, takhayul

dan agama. Jadi, tidak ada penanaman doktrin agama pada rakyat. Prinsip dalam Komunisme, “Agama adalah Candu” membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain yang dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi). Dalam sistem Komunisme menitikberatkan bahwa seluruh kekayaan adalah milik negara. Setiap individu boleh mencari kekayaan, namun tentu dibatasi. Sebab itulah sistem ekonomi Komunisme sering disebut sistem ekonomi totaliter. Sistem ekonomi totaliter dalam praktiknya berubah menjadi otoriter. Sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elit yang disebut sebagai polit biro yang terdiri dari elite-elite Partai Komunis. Sehingga, penerapan Sistem Politik Ekonomi Sosialis-Komunis akan tetap mewarisi kemiskinan dan gagal dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang ada.

B. Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Politik Ekonomi Islam dan Konsep Politik Ekonomi Ideal

Sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan Kapitalisme dan Komunisme. Sistem Ekonomi Islam dibangun di atas tiga pilar, yaitu Kepemilikan, Pengelolaan harta, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat (Yusanto dan Yunus, 2009: 124). Islam membagi sistem kepemilikan menjadi tiga jenis. *Pertama*: kepemilikan umum. Negara mengelola milik umum ini mewakili rakyat. Hasilnya didistribusikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk berbagai pelayanan.

Kepemilikan umum mencakup: (1) kepemilikan atas tambang yang depositnya sangat besar seperti logam mineral, minyak atau gas; (2) Berbagai fasilitas publik, yaitu harta yang dibutuhkan oleh masyarakat yang jika tidak tersedia mereka tercerai-berai dalam mencarinya. Jenis ini mencakup sumber energi, padang gembalaan, hutan

dan sumber air, dan sebagainya; (3) Harta yang dari sisi pembentukannya tidak bisa dimiliki individu seperti sungai, danau, pesisir, laut, jalan umum, dan sebagainya.

Kedua: Kepemilikan negara. Kepemilikan ini dikelola oleh negara dalam pos pendapatan negara. Hasilnya dibelanjakan untuk berbagai kepentingan negara seperti operasional negara, gaji pegawai, dsb; juga bisa untuk investasi negara di dalam pertanian, industri atau perdagangan yang tidak termasuk di dalam kepemilikan umum; atau dibelanjakan untuk mengembalikan keseimbangan di antara masyarakat di dalam masalah distribusi harta. *Ketiga:* Kepemilikan pribadi. Individu dan korporat swasta boleh memiliki pertanian, industri dan perdagangan yang tidak termasuk dalam kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Ketiga pilar ekonomi Islam, dibangun atas dasar aqidah Islamiyah yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Sistem Politik Ekonomi Islam yang diterapkan adalah menjamin terealisasinya pemenuhan setiap kebutuhan primer (*basic needs*) setiap orang secara keseluruhan, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupan sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu (An-Nabhani, 2018: 69).

Adapun jaminan pemenuhan kebutuhan primer di dalam Islam, karena Islam memandang setiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama-tama Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara

menyeluruh. Berikutnya, baru Islam memandang manusia sebagai kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Pada saat yang sama Islam memandang manusia sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa konsep Politik Ekonomi Islam merupakan konsep ideal, jika diterapkan akan mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang ada. Penerapan Sistem Politik Ekonomi Islam menjamin terpenuhi kebutuhan primer/pokok. Jika kebutuhan primer/pokok setiap individu sudah terpenuhi, maka taraf hidup individu yang bersangkutan akan mengalami perubahan, dan secara otomatis mengeluarkannya dari kondisi kemiskinan.

Secara umum di dalam Islam, ada 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan barang dan kebutuhan akan jasa. Kebutuhan akan barang terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Adapun kebutuhan akan jasa, terdiri dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Keenam jenis kebutuhan pokok tersebut dijamin pemenuhannya oleh Negara dengan mekanisme langsung dan tidak langsung. Mekanisme langsung, adalah mekanisme yang dilakukan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan tersebut, di mana Negara menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan dan menjamin keamanan.

Adapun pemenuhan kebutuhan melalui mekanisme tidak langsung, melalui mekanis-mekanisme berikut:

1. Islam mewajibkan kepada kerabat terdekat yang memiliki hubungan darah untuk membantu menanggung berbagai kebutuhan pokok saudara senasabnya.
2. Apabila kondisi pertama belum juga dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, maka Islam memecahkannya dengan memberikan harta sedekah (zakat) yang dikumpulkan oleh Negara (dari kas Baitul Maal) dari Muzakki untuk diberikan kepada mustahiq, di antaranya fakir dan miskin.
3. Apabila kondisi kedua juga belum berhasil memecahkan problematika kemiskinan, maka Islam mengharuskan Negara menanggung kebutuhan orang fakir/miskin dari kas Baitul Maal di luar pos zakat.
4. Apabila kas negara dalam keadaan kosong atau kas kurang dalam memenuhi kebutuhan fakir/miskin, maka kewajiban itu beralih kepada seluruh kaum Muslimin yang memiliki kemampuan. Tahap kelima ini dikenal dengan istilah “dharibah” (Zulhelmy, 2013: 162-165).

Dari uraian di atas tampaklah bahwa Politik Ekonomi Islam di atas telah dibangun dengan berpijak pada asas pemenuhan kebutuhan setiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu serta asas bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi apa saja yang bisa memuaskan kebutuhan. Karena itu, Politik Ekonomi

Islam tersebut sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan hukum syariah yang diterapkan oleh setiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah SWT serta dilaksanakan oleh Negara, melalui pembinaan dan pengundang-undangan hukum syariah.

Dengan demikian, melalui mekanisme-mekanisme tersebut di atas, maka dipastikan angka kemiskinan di suatu negara akan berkurang, dan juga tidak tertutup kemungkinan akan kesulitan mencari fakir/miskin, sebagaimana yang pernah terjadi di era kejayaan Islam tempo dulu, di antaranya pada masa Khalifah ‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Aziz *radhiallahu ‘anhu*. Dengan demikian, jelaslah bahwa Politik Ekonomi Islam merupakan sistem politik ekonomi yang ideal dan solusi fundamental dari persoalan ekonomi dan kemiskinan suatu bangsa di dunia

KESIMPULAN

Membahas fakta dan realitas kemiskinan yang terjadi baik di Negara yang mengadopsi Sistem Politik Ekonomi Kapitalis, Sosialis-Komunis atau Negara yang mengkombinasikan kedua sistem tersebut, maka jelaslah penerapan Sistem Politik Ekonomi selain Islam tidak akan mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang muncul dan hadir di tengah kehidupan bermasyarakat atau Negara. Justeru sebaliknya, penerapan Politik Ekonomi tersebut akan mewarisi kemiskinan struktural di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan menerapkan Islam secara kaffah dengan penerapan Politik Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem Politik Ekonomi yang ideal, dan satu-satunya sistem kokoh yang terbukti secara empirik berhasil mewujudkan kemakmuran dan keadilan ekonomi di tengah masyarakat.

REFERENSI

Abdurrahman Al-Maliki. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil Jatim. Penerbit Izzah.

Ahmad Sukardja, 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran fikih*. Bandung. Pustaka Setia.

Departemen Agama RI, 2005, Al-qur'an dan Terjemahannya, CV Penerbit J-ART

Friedman, Jhon. 1982. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge: Blackwell.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Penerbit Al-Azhar Press

Taqiyuddin An-Nabhani. 20018. *Sistem Ekonomi Islam Edisi Mu'tamadah*, Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.

Yusuf Qaradhawi. 2002. *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Zulhelmy bin Mohd Hatta. 2013. *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam-Suatu Pendekatan Institusional*. Bogor: Al-Azhar Presszone Publishing.

<https://geotimes.co.id/kolom/politik/membedah-islam-politik-politik-islam-dan-khilafah/1/12/2017>

<https://www.inews.id/finance/keuangan/standar-kemiskinan-pengeluaran-sebulan-rp199-juta-per-keluarga>

<https://www.liputan6.com/global/read/2106060>

<https://www.voaindonesia.com/14/7/2018>

Media Masa :

<https://salamadian.com/pengertian-politik-adalah/31/12/2018>